

**PERWUJUDAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DI KABUPATEN MAGELANG**

Oleh :

Rachmasari Anna Khoirunnisaa

E1A016015

ABSTRAK

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*) dalam pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting, salah satunya pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL). Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan dalam hal ini masyarakat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Apabila pemerintah dalam memberikan pelayanan KTP-el sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka pelayanan publik dapat dikatakan sudah maksimal dalam pelayanannya.

Penelitian ini menganalisis mengenai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan KTP-el di Kabupaten Magelang dan hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan KTP-el di Kabupaten Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.

Hasil Penelitian bahwa Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sudah diterapkan secara maksimal dan telah memenuhi empat prinsip yaitu Prinsip Transparan, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Efektif dan Efisien, dan Prinsip Persamaan Hak dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Hambatan dalam Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dalam pelayanan KTP-el yaitu adanya faktor eksternal dan faktor internal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan tidak sanksi yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dalam kepengurusan KTP-el.

Kata kunci: Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

**IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN
ELECTRONIC IDENTITY CARD SERVICE IN MAGELANG
DISTRICT**

By:

Rachmasari Anna Khoirunnisaa

E1A016015

ABSTRACT

Good Governance in public services is very important, one of which is the issuance of Electronic Identity Cards (KTP-EL). The government is required to provide services that are oriented towards meeting the needs and satisfaction of service recipients in this case the community, this is in accordance with Law No.

25 of 2009 concerning Public Services. If the government provides e-KTP services in accordance with the principles of good governance, public services can be said to have been maximized in their services.

This study analyzes the realization of good governance in the e-KTP service in Magelang Regency and the obstacles in realizing good governance in the e-KTP service in Magelang Regency. The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. The data used are primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, while secondary data was obtained from literature study. The data that has been obtained is then analyzed by qualitative methods and presented in the form of a systematic description.

The results of the study show that the realization of Good Governance in the Electronic Identity Card (KTP-el) Service at the Population and Civil Registration Office of Magelang Regency has been maximally implemented and has fulfilled four principles, namely the Principle of Transparency, the Principle of Accountability, and the Principle of Effectiveness. and Efficient, and the Principle of Equal Rights in Good Governance. Barriers to the realization of Good Governance in the e-KTP service, namely the existence of external and internal factors from the Magelang Regency Population and Civil Registration Office and not the sanctions stated in the legislation in the KTP-el management.

Keywords: Electronic Identity Card, Public Service, Good Governance